

Fenomena Kelompok Simpatisan Partai Persatuan Pembangunan di Sleman dalam Perspektif Ruang Publik

Alfian Fikri Surya Putra^{1*}, Agnes Sunartiningsih²

*Corresponding Author: alfian.fikri.surya.putra@mail.ugm.ac.id

^{1,2}Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v10i1.14174

Abstract

This research focuses on the phenomenon of relation between non-state groups and their patrons. Specifically, this study analyzes the phenomenon of PPP sympathetic groups in Sleman Regency. Using a qualitative research design with a case study approach, this study aims to explain the background of the formation of the PPP sympathetic group and the group's relationship with its political patrons, viewed in the Habermas public sphere approach. This research finding shows that the existence of PPP sympathizers is motivated by the similarity in political preferences of civil society in that are sympathetic to the PPP political movement. The PPP sympathetic group becomes a forum for sympathizers to fill the discourse of the struggle for Islamic values in the public sphere through ideas, opinions, and concrete actions such as public campaigns during the election period, holding religious activities, to charitable social activities. In addition, through their relations with political patrons, the PPP sympathizers have access to various forms of alternative welfare such as an access to get a job, access to government's social assistance program, and funding for group activity. This relation is a response caused by injustice and inequality in mainstream development discourse.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada fenomena relasi kelompok simpatisan PPP di Kabupaten Sleman dengan patron politiknya. Menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya kelompok simpatisan PPP Sleman dan relasi kelompok tersebut dengan patron politiknya, ditinjau dalam pendekatan ruang publik Habermas. Temuan peneliti menegaskan bahwa eksistensi kelompok simpatisan PPP Sleman didasari oleh adanya kesamaan preferensi politik masyarakat sipil di Sleman yang simpati terhadap pergerakan politik PPP. Kelompok simpatisan PPP Sleman menjadi wadah bagi para simpatisan untuk mengisi diskursus perjuangan nilai-nilai Islam dalam ruang publik baik melalui gagasan, opini, maupun tindakan-tindakan konkret seperti kampanye publik pada saat masa pemilu, mengadakan kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang bersifat karitatif. Di samping itu, melalui relasinya dengan patron politik, kelompok simpatisan PPP Sleman memiliki akses terhadap berbagai bentuk kesejahteraan alternatif seperti akses pada mata pencaharian, akses pada program bantuan sosial pemerintah, hingga bantuan dana operasional kelompok. Relasi tersebut muncul sebagai respon atas ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan.

Keywords

kelompok non-negara, kesejahteraan alternatif, patron politik, ruang publik, simpatisan PPP Sleman,

Article History

Received January, 6,
Revised February, 10
Accepted June 9
Published June 30

Corresponding Author

Alfian Fikri Surya Putra,
Departemen Pembangunan
Sosial dan Kesejahteraan,
Universitas Gadjah Mada.
Jl. Sosio-Yustisia 69,
Caturtunggal, Sleman,
Yogyakarta. 55281.

Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada tahun 2019 menjadi ajang bagi para pesertanya untuk saling bersaing memenangkan kontestasi politik. Kontestasi politik pada tahun 2019 tersebut mendorong para kandidat untuk dapat menjangking suara sebanyak-sebanyaknya demi memenangkan kontestasi. Berbagai upaya pemenangan dilakukan, contohnya meliputi kampanye secara daring melalui iklan maupun media sosial (Ardha, 2014), atau melakukan strategi *vote buying* (Sumarto, 2014). Upaya lain yang lazim dilakukan adalah menjalin relasi dengan kelompok-kelompok non-negara yang dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat, serta dapat menguntungkan secara politik (Facal, 2019; Pribadi, 2015; Saepudin & Kamaruddin, 2018).

Pertautan antara eksistensi kelompok-kelompok non-negara dengan kepentingan ekonomi politik elit atau penguasa bukan merupakan hal baru. Studi yang dilakukan Ahnaf (2017), Gunawan FX dan Patria (2002), Masaaki dan Rozaki (2006), dan Wilson (2018) menunjukkan bahwa kelompok elit maupun penguasa lokal seringkali menjalin relasi dengan kelompok-kelompok non-negara seperti geng, mafia, preman, laskar, satuan tugas partai, milisi sipil, kelompok simpatisan partai, ormas, hingga kelompok *vigilante* demi mengamankan tujuan politiknya. Kelompok-kelompok non-negara tersebut lazimnya memiliki afiliasi dengan pemerintah, korporasi, militer, institusi keagamaan, serta partai politik dalam bentuk relasi yang klientelistik (Kafid, 2016).

Di Indonesia, secara historis kemunculan kelompok-kelompok non-negara pada awalnya merupakan suatu bentuk gerakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial pada era kemerdekaan (Gunawan, FX & Patria, 2002; lihat juga Nordholt & Erman, 2002). Gerakan perlawanan tersebut banyak diinspirasi oleh cerita legenda “Si Pitung” yang dianggap sebagai representasi pahlawan bagi rakyat yang tertindas. Seperti misalnya, terdapat gerakan perlawanan yang dilakukan kelompok Laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Budi & Hidayat, 2019). Gerakan perlawanan Laskar Laut Sibolga di wilayah Sibolga dan Tapanuli (Priyono, 2019). Hingga gerakan perlawanan Laskar Hizbullah pada Pertempuran 10 November Surabaya (Mulyaningsih & Hamidah, 2018).

Pada masa Orde Baru, terdapat kelompok-kelompok non-negara yang dikooptasi oleh pemerintah demi melanggengkan *status quo*, serta mengamankan kepentingan pragmatik ekonomi politik rezim. Studi mengenai kelompok Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, dan Pam Swakarsa menjelaskan eksistensi kelompok-kelompok milisi yang terkooptasi dengan kepentingan penguasa Orde Baru dan kepentingan militer pada masanya (Gunawan, FX & Patria, 2002; Wilson, 2018). Eksistensi kelompok-kelompok non-negara ini kemudian semakin menguat pada era reformasi, yakni ketika pemerintahan yang bersifat desentralistik, kemudian memunculkan penguasa-penguasa lokal (Gaffar, 2006; lihat juga Hadiz, 2010). Kepentingan penguasa-penguasa lokal ini kemudian bertemu dengan praktik “swastanisasi kekerasan” yang dilakukan oleh kelompok-kelompok non-negara tersebut.

Kelompok-kelompok non-negara pada masa pasca reformasi eksis dengan mengusung berbagai macam atribusi mulai dari simbolisasi agama, kelompok berbasis sosio-kultural, hingga simpatisan partai politik. Studi mengenai kelompok FPI (Mudhoffir, 2017; Satya, 2017; Wilson, 2014) dan Banser NU (Fealy & McGreror, 2010; Salim, 2004) menunjukkan kelompok non-negara yang dianggap merepresentasikan simbolisasi kekuatan massa umat Islam. Terdapat pula

kelompok-kelompok non-negara yang berbasis sosio-kultural di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh studi mengenai Forum Betawi Rempug di Jakarta (Nina, 2012; Wilson, 2018), *Jawara* di Banten dan Lampung (Facal, 2019; Hamid & Masaaki, 2008; Saepudin & Kamaruddin, 2018), *Blater* di Madura (Pribadi, 2015; Raditya, 2011), Laskar Pecalang di Bali (Suyawan, 2014), dan Laskar Dayak di Kalimantan (Masaaki & Rozaki, 2006).

Serta studi yang dilakukan Gunawan dan Patria (2002), Lubis (2016), dan Tajima (2018) mengenai eksistensi kelompok Banteng *Sirotaal Mustaqim* (BSM), Laskar *Joxz’in*, dan Gerakan Pemuda *Ka’bah* (GPK) yang menjadi kelompok *underbouw* atau organisasi sayap kepartaian yang loyal dengan partai politik patronnya. Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat fenomena kelompok simpatisan partai politik, atau kelompok non-negara yang simpatik terhadap partai politik tertentu. Terdapat dua kelompok simpatisan partai yang mengalami polarisasi serta memiliki sejarah rivalitas panjang di Sleman yaitu kelompok simpatisan PPP dan PDI Perjuangan (Ahnaf, 2017; lihat juga Lubis, 2016). Proses polarisasi di antara dua kelompok simpatisan tersebut terbentuk akibat kontestasi ideologis, kontestasi berbasis ruang, kepentingan ekonomi politik, serta afiliasi dengan partai politik.

Penelitian ini sendiri berfokus pada eksistensi kelompok simpatisan PPP di Sleman. Peneliti menganalisis fenomena kelompok simpatisan PPP Sleman dalam pendekatan ruang publik serta eksistensi kelompok-kelompok tersebut sebagai efek dari diskursus pembangunan arus utama. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana latar belakang terbentuknya kelompok simpatisan PPP Sleman? Kemudian yang kedua, bagaimana relasi antara kelompok simpatisan PPP Sleman dengan patron politiknya ditinjau dalam pendekatan ruang publik?

Kerangka Teoritis

Beberapa peneliti, merumuskan fenomena bertemunya eksistensi kelompok non-negara dengan kepentingan ekonomi maupun politik dari patronnya dalam berbagai istilah. Seperti istilah “gengsterisme politik” yang menggambarkan fenomena kelompok non-negara seperti geng, preman, laskar, satuan tugas partai, milisi sipil, kelompok simpatisan partai, ormas, maupun kelompok *vigilante* serta relasinya dengan patron politik (Hadiz, 2005; Wilson, 2018). Istilah lain yang juga digunakan selain “gengsterisme politik” misalnya oleh Gunawan dan Patria (2002), yang menggunakan istilah “premanisme politik” dalam menggambarkan watak “premanisme” negara yang menggunakan pendekatan militeristik serta koersif dalam menyelesaikan konflik di Timor Leste, yaitu dengan mengooptasi kelompok milisi sipil untuk mengintimidasi masyarakat setempat.

Schulte-Bockholt (2006) menggunakan istilah *politic of protection racket* atau “politik jajah preman” untuk menjelaskan upaya elit-elit negara dalam melanggengkan dominasi dan hegemoninya, dengan merangkul kelompok non-negara yang disruptif seperti geng atau kelompok preman. Stanley (1996) juga menggunakan istilah *protection racket state* untuk menjelaskan relasi antara kepentingan kekuasaan dan praktik kekerasan dalam konteks perang saudara yang terjadi di El Salvador. Selain itu terdapat pula istilah-istilah lain yang digunakan dalam beberapa studi sebelumnya seperti istilah “tatanan non-negara” (Rodgers, 2006), “spesialis kekerasan non-pemerintah” (Sassen, 2003; Tilly, 2012), hingga istilah *violent entrepreneur* atau “pengusaha kekerasan” (Blok, 1988; Galary & Volkov, 2003). Peneliti menggunakan istilah

kelompok non-negara yang merujuk pada kelompok simpatisan PPP Sleman. Lebih lanjut, peneliti juga membuat kategorisasi kelompok simpatisan PPP Sleman dalam dua kelompok yakni kelompok laskar simpatisan PPP Sleman dan kelompok GPK Sleman.

Peneliti menggunakan pendekatan ruang publik sebagai kerangka analisis dalam melihat fenomena kelompok simpatisan PPP di Sleman. Di sini peneliti meminjam kerangka analisis Habermas mengenai ruang publik atau *Öffentlichkeit* dalam Bahasa Jerman. Secara mendasar, ruang publik *a la* Habermas bukan merujuk pada sebuah bentuk bangunan tertentu, melainkan kondisi-kondisi di mana individu atau warga negara dapat mengartikulasikan opini-opini, kepentingan-kepentingan, maupun tujuan-tujuannya dalam konteks masyarakat demokratis (Habermas, 1991). Secara historis, ruang publik “dikonstruksi” oleh masyarakat kelas borjuis di negara-negara Eropa seperti di Inggris dan Prancis sekitar abad ke-18. Hal tersebut merupakan upaya masyarakat borjuis (atau dalam konteks sekarang adalah kelas menengah) untuk “melepaskan diri” dari hegemoni negara dan gereja. Kemudahan dalam mengakses pendidikan, berkembangnya budaya literasi, serta maraknya ketertarikan masyarakat terhadap sastra turut membangkitkan kesadaran politik dan pemikiran kritis pada saat itu.

Seiring dengan berkembangnya gagasan humanisme dan demokrasi, ruang publik mewujud dalam forum-forum diskusi politik kritis yang dilakukan masyarakat sipil di salon-salon maupun di kedai kopi (Habermas, 1991). Melalui ruang publik, masyarakat sipil dapat menemukan wadah, baik dalam hal penyaluran gagasan hingga melancarkan kritik terhadap pasar maupun negara. Sehingga ruang publik juga dapat dikatakan sebagai ruang yang otonom baik terhadap kepentingan pasar maupun kepentingan kekuasaan negara. Pada perkembangannya, gagasan maupun kritik yang mengisi ruang publik masyarakat sipil, kemudian terlembagakan ke dalam hadirnya kelompok, serikat, maupun organisasi yang mewadahi opini dan juga gagasan masyarakat sipil.

Dalam hal ini termasuk dengan adanya eksistensi kelompok simpatisan partai politik. Kelompok simpatisan partai politik merupakan wadah di mana masyarakat sipil yang memiliki kesamaan preferensi politik maupun dukungan terhadap suatu partai tertentu, dapat berkumpul dan berasosiasi. Di samping itu, melalui kelompok tersebut, para simpatisan dapat memiliki relasi dengan patron politik mereka, yang juga memberikan mereka akses terhadap sumber perekonomian. Atau dengan kata lain, kelompok simpatisan partai politik selain mengisi diskursus dalam ruang publik masyarakat sipil, dapat juga menjadi alternatif saluran kesejahteraan, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan akibat ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam diskursus pembangunan arus utama (Fakih, 2013).

Metode

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus di sini berfokus pada deskripsi makna dari perilaku kelompok simpatisan PPP Sleman, sebagai sebuah fenomena sosial yang kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2009). Penelitian ini sendiri secara spesifik mengambil lokasi di Kabupaten Sleman yang merupakan basis wilayah kelompok simpatisan PPP Sleman yang memiliki dinamika tersendiri, baik internal kelompok tersebut maupun juga dalam relasinya dengan patron politik.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Proses wawancara mendalam sendiri dilakukan dengan mewawancarai sembilan (9)

orang informan yang terkait dengan fenomena kelompok simpatisan PPP Sleman. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang ditujukan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai informan yang telah dipetakan sesuai dengan konteks kajian (Sugiyono, 2013). Informan di antaranya berasal dari kelompok laskar yaitu Laskar KOMPI Bhorot dan Laskar Remblong, kelompok GPK Sleman, Satgas PPP Sleman, dan kader internal sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sleman Fraksi PPP periode 2019-2024.

Di samping data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti juga mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur terkait yang membahas seputar fenomena kelompok non-negara, seperti jurnal dan buku. Sumber-sumber literatur tersebut membantu peneliti untuk mengonstruksikan sebuah analisis mengenai fenomena yang diteliti (Snyder, 2019). Kemudian langkah teknik analisis data dilakukan dengan membuat transkrip data-data wawancara, menganalisis kembali data-data tersebut, membuat kategorisasinya sesuai dengan rumusan masalah, menginterpretasikannya, kemudian melakukan generalisasi (Creswell, 2014).

Selain itu peneliti juga melakukan proses validasi data dengan teknik triangulasi sumber data (Creswell, 2014; Fusch et al., 2018). Langkah tersebut dilakukan dengan mencari justifikasi serta kecocokan data berdasarkan berbagai sumber informasi di antaranya melalui hasil wawancara dengan informan, hasil observasi peneliti baik ketika wawancara maupun di luar wawancara, dan juga hasil dokumentasi kegiatan kelompok terkait, baik melalui dokumentasi pribadi peneliti maupun dokumentasi milik kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Kelompok Laskar Simpatisan PPP

Laskar merupakan komunitas terkecil simpatisan partai. Latar belakang anggota-anggota laskar dapat dikatakan beragam. Terdapat anggota yang memiliki latar belakang religius, namun terdapat pula yang memiliki latar belakang “preman” atau orang jalanan (WA, 2020; WB, 2020). Kelompok ini bersifat non-struktural, disebabkan tidak adanya wadah resmi dari partai untuk mengakomodir para simpatisan PPP di kalangan akar rumput, kemudian mendorong para simpatisan PPP secara swadaya membentuk suatu wadah organisasi yang disebut laskar. Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat lebih dari 50 laskar simpatisan PPP yang masih aktif. Lebih dari 50 laskar simpatisan PPP Sleman yang aktif tersebut adalah kelompok laskar yang tercatat secara resmi dalam Forum Silaturahmi dan Komunikasi Laskar PPP Sleman (WB, 2020).

Gambar 1. Kesamaan Preferensi Politik Mendorong Terbentuknya Kelompok Laskar Simpatisan PPP



Sumber: Olah Data Peneliti, 2020

Skema pada gambar 1 di atas menunjukkan bagaimana laskar simpatisan PPP dapat terbentuk, yang disebabkan adanya kesamaan preferensi politik antar simpatisan. Preferensi tersebut kemudian diartikulasikan dengan cara mendukung, kemudian secara kolektif membentuk kelompok yang militan dalam mendukung PPP. Di Kabupaten Sleman, PPP (di samping PDI Perjuangan) merupakan salah satu partai politik yang memiliki militansi massa yang kuat (KH, 2020; WA, 2020). Apabila massa simpatisan PDI Perjuangan memiliki preferensi politik marhaenis, yaitu preferensi yang menekankan perjuangan politik untuk membela *wong cilik*. Maka, para simpatisan PPP cenderung memiliki preferensi politik yang berbeda. Preferensi politik tersebut menekankan bahwa dalam politik, sebagai seorang muslim mereka harus turut memperjuangkan nilai-nilai Islam. Upaya tersebut dijawantahkan dalam bentuk dukungan dan bergabung dalam kelompok laskar simpatisan PPP, dalam hal ini PPP dianggap sebagai partai yang merepresentasikan perjuangan nilai-nilai Islam dalam ranah publik.

Tabel 1. Faktor Pembentuk Preferensi Politik Simpatisan PPP Sleman

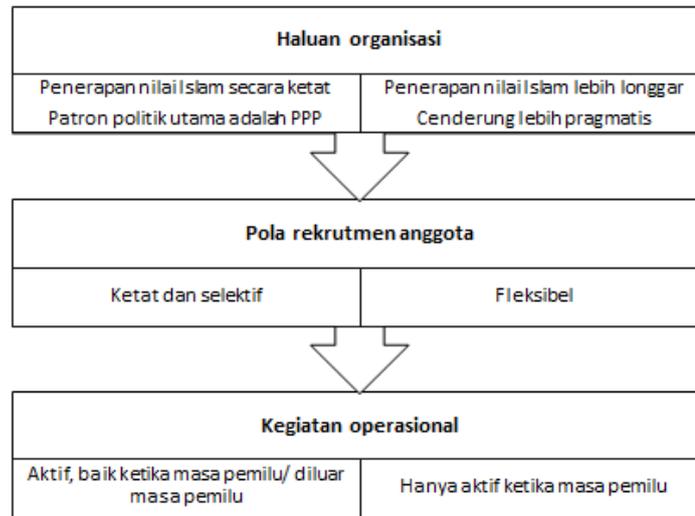
Faktor Pembentuk Preferensi Politik Simpatisan PPP Sleman		
Keluarga	Lingkungan Pergaulan	Guru <i>Ngaji</i>

Sumber: Olah Data Peneliti, 2020

Tabel 1 di atas menunjukkan beberapa faktor yang turut berkontribusi atas terbentuknya preferensi politik laskar simpatisan PPP Sleman. Di antaranya terdapat faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, hingga faktor guru *ngaji* (AV, 2020; RA, 2020; WB, 2020). Dalam konteks laskar simpatisan PPP Sleman, terdapat anggota laskar yang bergabung karena orang tua atau keluarganya merupakan simpatisan PPP (WB, 2020). Namun mayoritas anggota laskar yang berusia sekolah menengah atau dewasa muda biasanya bergabung karena faktor lingkungan pertemanan atau pergaulan baik itu di sekolah, di kampung, maupun di kelompok geng. Berbicara terkait kelompok geng, daerah Sleman sendiri masih kental dengan sub-kultur geng jalanan anak muda (RA, 2020; WB, 2020).

Terkait dengan faktor pergaulan, anak-anak muda biasanya tertarik bergabung dengan laskar karena didasari oleh rasa ingin unjuk kekuatan diri dan kelompoknya (AV, 2020; SU, 2020). Kegiatan konvoi dan iring-iringan sepeda motor ketika kampanye merupakan salah satu sarana unjuk kekuatan diri dan kekuatan kelompok laskar. Faktor lain yang membentuk preferensi politik seseorang untuk menjadi simpatisan PPP adalah faktor guru *ngaji*. Dalam kasus Laskar Kompi Bhorot misalnya, terdapat anggota laskar yang menjadi simpatisan PPP karena pengaruh guru *ngaji*, yang kebetulan juga merupakan simpatisan PPP (AV, 2020). Dalam sebuah forum pengajian misalnya, guru *ngaji* akan memberi pemahaman bahwa sebagai orang Islam, apabila berpolitik diusahakan untuk mendukung partai yang memperjuangkan nilai-nilai Islam, salah satunya adalah mendukung PPP (AV, 2020).

Gambar 2. Perbedaan Karakteristik Antar Kelompok Laskar Simpatisan PPP Sleman



Sumber: Olah Data Peneliti, 2020

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar kelompok-kelompok laskar simpatisan PPP yang ada di Sleman. Perbedaan tersebut mencakup haluan organisasi, pola rekrutmen anggota, dan kegiatan operasional laskar. Perbedaan dalam hal haluan organisasi terlihat dari adanya beberapa laskar yang memegang teguh nilai-nilai Islam dalam praktik organisasinya. Seperti melarang konsumsi minuman keras dan barang-barang haram lainnya bagi anggota laskar (walaupun pada praktiknya masih saja terdapat anggota laskar yang mengonsumsi minuman keras secara sembunyi-sembunyi). Selain itu juga terdapat kelompok laskar yang memiliki komitmen untuk tidak mencari penghasilan di tempat-tempat yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tempat hiburan malam.

Namun di sisi lain terdapat pula beberapa kelompok laskar yang cenderung lebih “longgar” dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai Islam sebagai haluan organisasinya. Misalnya saja dengan membiarkan anggota-anggotanya menjual jasa pengamanan di tempat hiburan malam, dengan dalih sulit mencari pekerjaan yang “halal” (AV, 2020). Kemudian berbicara mengenai loyalitas laskar kepada patron politiknya. Beberapa laskar memang loyal terhadap PPP Sleman atau siapapun kandidat yang diusung PPP Sleman dalam setiap kontestasi politik. Namun terdapat beberapa laskar yang karena tidak puas dengan kepengurusan partai yang ada di PPP, kemudian mengekspresikannya dengan cara mendukung partai lain atau kandidat yang diusung oleh partai lain.

Berbicara terkait rekrutmen anggota, kelompok laskar simpatisan PPP Sleman memiliki pola rekrutmen anggota yang berbeda. Beberapa kelompok laskar cenderung lebih bebas dalam hal perekrutan anggota. Bebas dalam artian, siapa saja yang berminat dipersilakan untuk bergabung. Pola perekrutan yang bebas seperti ini memang menguntungkan dari segi besarnya jumlah massa dalam sebuah kelompok laskar. Namun besarnya jumlah massa dalam kelompok laskar ternyata tidak selamanya menguntungkan secara politik. Mayoritas kelompok laskar

simpatisan PPP Sleman, yang memiliki jumlah massa besar, hanya terlihat “menyeramkan” ketika sedang konvoi di jalan pada saat kampanye (UBR, 2020). Namun ketika hari pemilihan suara, jumlah massa yang besar tersebut tidak dapat mendongkrak suara PPP di Sleman, karena massa hanyalah anak-anak muda yang mayoritas belum memiliki hak pilih. Selain itu, kebanyakan anggota laskar yang bergabung kurang memiliki kecakapan politik sehingga tidak mampu “mengajak” masyarakat di tempat tinggalnya untuk memilih PPP.

Di samping terdapat kelompok laskar yang pola perekrutan anggotanya bebas, terdapat pula kelompok laskar yang cenderung lebih ketat dalam perekrutan anggota. Seperti di kelompok Laskar Remblong, calon anggota yang ingin bergabung diharuskan mendapat rekomendasi dari anggota Laskar Remblong lain yang sudah bergabung (RA, 2020; WB, 2020). Kemudian calon anggota diharuskan untuk mengisi formulir serta surat pernyataan yang berisi komitmen untuk mematuhi aturan-aturan laskar seperti larangan untuk minum minuman keras ketika ada acara laskar, atau acara yang berkaitan dengan PPP. Hingga larangan untuk menyalahgunakan nama laskar demi kepentingan ego pribadi seperti memprovokasi kelompok simpatisan partai lain maupun melakukan perbuatan kriminal.

Kelompok laskar lain yang juga menerapkan pola perekrutan anggota secara ketat adalah Laskar Kompi Bhorot. Kelompok laskar ini menetapkan batasan usia minimal untuk bergabung yaitu 17 tahun (demikian halnya di Laskar Remblong), dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang sudah memiliki hak pilih ketika pemilu (AV, 2020). Laskar Kompi Bhorot juga menerapkan aturan serta sanksi yang ketat bagi anggota yang menyalahi peraturan laskar. Misalnya apabila terdapat anggota yang bermasalah dengan kelompok massa simpatisan partai lain dan secara hukum terbukti bersalah, maka atribut laskar yang dimiliki akan diambil kembali dan anggota yang bermasalah tersebut bisa dikeluarkan dari laskar (AV, 2020; WB, 2020).

Perbedaan karakteristik antar laskar simpatisan PPP Sleman tidak hanya tercermin dari haluan organisasi dan pola perekrutan anggotanya saja. Dalam aspek kegiatan operasional laskar juga berbeda-beda. Terdapat beberapa laskar yang hanya aktif ketika masa pemilu. Ketika masa pemilu banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampanye PPP seperti acara pengajian, acara sosialisasi program dari kandidat yang bersangkutan, atau konvoi iring-iringan kendaraan bermotor. Namun terdapat pula beberapa laskar yang aktif melakukan kegiatan bahkan saat di luar masa pemilu. Laskar Remblong misalnya, banyak melakukan kegiatan di luar masa pemilu. Mulai dari kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin setiap bulan, hingga kegiatan yang bersifat karitatif seperti membagikan paket sembako setiap hari raya, serta kegiatan santunan anak yatim (RA, 2020; WB, 2020). Pembiayaan operasional kegiatan tersebut biasanya bersumber dari dana swadaya laskar melalui *infuq* rutin anggota, selain itu Laskar Remblong juga menerima donasi dari masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan santunan anak yatim.

Sama halnya dengan Laskar Remblong, Laskar Kompi Bhorot juga melakukan kegiatan keagamaan seperti pengajian setiap enam bulan sekali untuk anggota laskar (BB, 2020). Selain itu juga mengadakan kegiatan yang bersifat karitatif seperti memberikan bantuan alat tulis untuk anak-anak TPA (Taman Pendidikan *Al-Quran*) setiap Bulan Ramadhan (AV, 2020). Untuk pembiayaan operasional kegiatan Laskar Kompi Bhorot, biasanya bersumber dari iuran sukarela anggota laskar. Selain itu sumber pembiayaan dapat berasal dari donasi sukarela masyarakat, iuran para pedagang yang memanfaatkan jasa keamanan dan jasa kebersihan dari Laskar Kompi

Bhorot, hingga dana bantuan dari anggota dewan yang didukung laskar pada saat pemilu (AV, 2020; BB, 2020). Terkait iuran dari pedagang di sekitar wilayah basis Laskar Kompi Bhorot. Selain memberikan jasa keamanan dan kebersihan sebagai imbal balik, Laskar Kompi Bhorot juga memberikan transparansi penggunaan dana iuran dari para pedagang tersebut (BB, 2020). Hal ini dilakukan guna menjaga rasa kepercayaan dari para pedagang sekitar wilayah basis laskar.

Kasus Laskar Remblong dan Laskar Kompi Bhorot di atas menunjukkan bahwa, fokus kegiatan non-politik yang dilakukan laskar simpatisan PPP Sleman lebih berorientasi pada dakwah atau “promosi” nilai-nilai keagamaan, yang dalam hal ini adalah nilai-nilai Islam. Hal tersebut kemudian memberikan implikasi lanjutan baik secara internal maupun eksternal laskar. Secara internal, kegiatan-kegiatan keagamaan dilakukan oleh laskar dengan harapan dapat memberikan kesadaran, khususnya bagi anggota laskar yang masih melakukan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti mengonsumsi minuman keras. Secara eksternal, kegiatan sosial yang berorientasi dakwah keagamaan, secara tidak langsung akan membangun citra positif laskar di mata masyarakat sekitar, yang kemudian berimbas pada peningkatan popularitas PPP ketika pemilu.

Selain melakukan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang bersifat karitatif. Beberapa kelompok laskar simpatisan PPP Sleman, seperti Laskar Remblong maupun Laskar Kompi Bhorot juga melakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya. Upaya tersebut didasari oleh kondisi perekonomian anggota laskar yang mayoritas berada pada tingkat menengah ke bawah, di samping itu juga banyak anggota laskar yang pengangguran (RA, 2020; WA, 2020; WB, 2020). Seperti upaya yang dilakukan Laskar Remblong dengan mendirikan unit usaha kolam ikan. Unit usaha tersebut memang diperuntukkan bagi anggota-anggota laskar yang belum memiliki pekerjaan tetap. Pendirian unit usaha tersebut juga tidak terlepas dari bantuan dana yang diberikan oleh anggota dewan yang merupakan patron politik Laskar Remblong. Upaya lain yang juga dilakukan misalnya seperti mempromosikan usaha milik anggota-anggota laskar, setiap kali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik.

Kelompok laskar lain seperti Laskar Kompi Bhorot juga memiliki orientasi untuk meningkatkan taraf perekonomian anggota-anggotanya. Laskar Kompi Bhorot memiliki akses terhadap lahan parkir area kompleks pertokoan dan hotel di wilayah basis mereka. Lahan parkir tersebut dapat dimanfaatkan oleh anggota-anggota laskar khususnya yang belum memiliki mata pencaharian tetap. Berbicara mengenai akses terhadap lahan parkir, kelompok non-negara seperti laskar simpatisan partai biasanya memanfaatkan akses tersebut untuk meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya.

Berbicara mengenai pemanfaatan akses lahan parkir. Setidaknya terdapat dua cara bagi kelompok-kelompok non-negara untuk mendapatkan akses “penguasaan” lahan parkir. Cara pertama dilakukan secara tidak resmi yaitu dengan melobi langsung ke tempat-tempat yang dituju. Cara ini biasanya diterapkan untuk mengakses lahan parkir di tempat-tempat hiburan malam (WA, 2020; WB, 2020). Cara kedua dilakukan dengan prosedur resmi yaitu dengan mendapatkan SK Pengelolaan Parkir dari Dinas Perhubungan setempat. Laskar Kompi Bhorot sendiri memanfaatkan prosedur resmi untuk mendapatkan akses lahan parkir (BB, 2020; WA, 2020). Mereka memanfaatkan patron politik mereka di dewan untuk menghubungkan Laskar

Kompi Bhorot dengan Dinas Perhubungan, sehingga mereka secara resmi mendapatkan izin untuk mengelola lahan parkir di sekitar wilayah basisnya (AV, 2020; WA, 2020).

Gerakan Pemuda *Ka'bah* (GPK) Sleman

Gerakan Pemuda *Ka'bah* (GPK) merupakan organisasi sayap kepartaian yang berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain GPK, terdapat beberapa organisasi sayap lain yang berafiliasi dengan PPP. Seperti Angkatan Muda *Ka'bah* (AMK), Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI), serta Wanita Persatuan (WP) (SU, 2020). Di Sleman sendiri, organisasi GPK memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam hal jumlah massa maupun posisi tawar dengan patron politik. Hal tersebut menjadikan GPK Sleman lebih berpengaruh ketimbang kelompok organisasi sayap PPP lain seperti AMK dan GMPI (WA, 2020). Eksistensi organisasi sayap kepartaian memang lazim adanya dalam sebuah partai politik. Beberapa partai politik lain juga memiliki organisasi sayap kepartaian, seperti misalnya Banteng *Shirotal Mustaqim* (BSM) yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan, kemudian ada Barisan Muda PAN (BM PAN) yang berafiliasi dengan PAN.

Sama halnya dengan kelompok laskar, organisasi sayap kepartaian seperti GPK merupakan organisasi non-struktural partai (KH, 2020; WA, 2020). Artinya, kelompok tersebut bukan bagian dari struktur organisasi atau struktur kepengurusan PPP. Walaupun secara historis, kelompok GPK didirikan oleh orang-orang PPP sendiri pada 29 Maret 1982. Tujuan orang-orang PPP mendirikan GPK adalah untuk menyoal para pemuda dan mempermudah rekrutmen bagi anak-anak muda yang ingin menjadi simpatisan PPP (SU, 2020; WA, 2020). GPK memiliki cabang kepengurusan mulai dari GPK Pusat yang berbasis di Jakarta, hingga GPK yang berada di daerah-daerah, termasuk GPK Sleman yang menjadi salah satu fokus subyek kajian dalam penelitian ini.

Secara hierarki sebenarnya dapat dikatakan bahwa GPK Sleman merupakan “induk” dari laskar-laskar simpatisan PPP yang ada di Kabupaten Sleman (IS, 2020; WA, 2020). Namun tidak semua kelompok laskar di Kabupaten Sleman mau untuk “menginduk” dengan GPK Sleman. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan visi antara kelompok laskar tertentu dengan GPK Sleman. Perbedaan visi tersebut dapat tercermin dalam hal pengelolaan organisasi. Selain perbedaan visi terdapat pula perbedaan dalam hal komitmen untuk mendukung PPP, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada Pemilu 2019, terdapat beberapa laskar yang mengambil posisi politik *kbittah*. Posisi politik tersebut “memungkinkan” para simpatisan PPP untuk mendukung partai lain atau kandidat dari partai lain, sebagai bentuk ketidakpuasan atas konflik dualisme kepemimpinan PPP Pusat. Kemudian perbedaan lain yang menyebabkan laskar simpatisan tidak mau menginduk kepada GPK Sleman adalah karena perbedaan komitmen dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi. Seperti tidak mencari sumber penghasilan di tempat-tempat hiburan malam. Walaupun begitu, memang tidak ada kewajiban secara formal maupun moral yang mengharuskan kelompok laskar simpatisan PPP di Sleman untuk bergabung dengan GPK Sleman.

Terkait rekrutmen anggota, GPK Sleman sendiri juga banyak merekrut anggota dari laskar-laskar di Kabupaten Sleman. GPK Sleman memiliki Divisi Brigadir *Ka'bah*. Divisi tersebut yang bertugas untuk melakukan rekrutmen, seleksi, memberikan penjelasan terkait deskripsi pekerjaan, serta menempatkan anggota-anggota baru pada divisi atau bidang sesuai dengan

kapasitas dan kemampuan. Latar belakang anggota GPK Sleman bermacam-macam. Terdapat anggota yang memang memiliki latar belakang “santri” atau religius, ada pula yang memiliki latar belakang sebagai “orang jalanan”. Terdapat anggota GPK Sleman yang bergabung karena tertarik dengan pergerakan politiknya, dan menjadikan GPK Sleman sebagai saluran preferensi politiknya (SU, 2020). Namun terdapat pula orang-orang yang bergabung di GPK Sleman, dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan (SU, 2020; WA, 2020).

Pada saat kontestasi politik seperti pemilu, tugas dan peran GPK Sleman sebagai kelompok simpatisan adalah untuk memenangkan PPP maupun kandidat yang diusung oleh PPP, khususnya di Kabupaten Sleman. Peranan GPK Sleman yang paling terlihat adalah ketika melakukan mobilisasi massa, baik ketika konvoi kendaraan bermotor maupun ketika acara-acara yang berkaitan dengan PPP seperti pengajian atau sosialisasi program dari kandidat. Seiring berjalannya waktu, sudah mulai muncul kesadaran dari anggota-anggota GPK Sleman untuk mengubah cara-cara kampanye yang sebelumnya terlihat “menyeramkan” ketika konvoi dengan kendaraan bermotor, dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat luas (WA, 2020).

Seperti halnya dengan kelompok laskar simpatisan PPP, selain sebagai saluran preferensi politik. GPK Sleman juga memiliki fungsi sebagai saluran kesejahteraan bagi para anggotanya. Maka dari itu, GPK Sleman sendiri membangun jaringan serta relasi terutama dengan anggota dewan yang menjadi patron politik mereka. Relasi dengan anggota dewan tersebut memudahkan para anggota yang ingin mencari pekerjaan tetap. Anggota-anggota yang masih pengangguran, dapat disalurkan untuk bekerja sebagai pekerja kerah biru seperti satpam, sopir, atau petugas kebersihan baik di hotel, restoran, *mall*, maupun di instansi pemerintahan seperti kantor dinas. Ada pula yang disalurkan untuk bekerja di objek wisata milik pemerintah daerah sebagai penarik retribusi, atau sebagai petugas parkir maupun petugas pengamanan untuk acara pasar malam maupun acara-acara publik yang diselenggarakan berbagai pihak (SU, 2020). Di samping itu, relasi dengan patron politik juga memudahkan para anggota untuk mengakses program-program pemerintah seperti bantuan dana pendidikan dan bantuan biaya kesehatan (WA, 2020).

Pendekatan Ruang Publik Terkait Fenomena Kelompok Simpatisan PPP Sleman

Kelompok simpatisan partai politik merupakan wadah di mana masyarakat sipil yang memiliki kesamaan preferensi politik dapat berkumpul dan berasosiasi. Termasuk kelompok simpatisan PPP di Sleman, yang merupakan wadah bagi masyarakat sipil di Sleman untuk mengartikulasikan preferensi politiknya dalam hal mendukung PPP, sebagai partai politik yang dianggap merepresentasikan perjuangan nilai-nilai Islam. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu diskursus yang berkembang dan mengisi ruang publik sehari-hari.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Kelompok Simpatisan PPP Sleman

Laskar Simpatisan PPP Sleman	GPK Sleman
Komunitas terkecil simpatisan PPP di Sleman. Terbentuk karena adanya persamaan preferensi politik.	Organisasi sayap PPP di tingkat DPC. Dibentuk untuk merekrut pemuda-pemuda yang simpati terhadap PPP.
Terdapat lebih dari 50 laskar simpatisan PPP di Sleman.	Memiliki struktur kepengurusan mulai dari GPK pusat hingga ranting.
Perbedaan antar kelompok laskar mencakup haluan organisasi, pola rekrutmen anggota, dan kegiatan operasional.	Biasanya mengooptasi orang-orang laskar.
Tidak terikat dengan struktur kepengurusan PPP, sehingga lebih bebas mengekspresikan sikap politiknya.	Tidak terikat dengan struktur kepengurusan PPP, sehingga lebih bebas mengekspresikan sikap politiknya.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2020

Tabel di atas menunjukkan gambaran besar mengenai perbandingan karakteristik antar kelompok simpatisan PPP di Sleman yang mencakup kelompok laskar simpatisan PPP Sleman dan kelompok GPK Sleman. Terbentuknya kelompok-kelompok simpatisan PPP Sleman tersebut pada dasarnya didasari oleh adanya kesamaan preferensi politik antar simpatisan PPP di Sleman. Preferensi politik tersebut menekankan bahwa sebagai seorang muslim, mereka memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Untuk mengartikulasikan preferensi tersebut, maka penting untuk memiliki wadah organisasi yang selain untuk menghimpun kekuatan massa pendukung PPP (yang dianggap sebagai simbol perjuangan nilai-nilai Islam) khususnya di Sleman, juga sebagai saluran untuk mengisi diskursus perjuangan nilai-nilai Islam dalam ruang publik.

Kelompok simpatisan PPP Sleman membangun narasi perjuangan nilai-nilai Islam tersebut melalui gagasan, opini, maupun tindakan-tindakan konkret seperti kampanye publik pada saat masa pemilu, mengadakan kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang bersifat karitatif. Kelompok simpatisan PPP Sleman sebagai suatu wadah penyaluran preferensi politik juga nampak dalam hal sikap politik yang mereka tunjukkan. Misalnya pada gelaran Pilpres 2019, dimana kelompok simpatisan PPP di Sleman mengambil sikap politik yang berbeda dengan kepengurusan PPP Pusat, yaitu dengan mendukung Prabowo Subianto calon presiden saat itu, alih-alih mendukung petahana Joko Widodo yang didukung oleh koalisi yang di dalamnya terdapat PPP. Di samping merupakan saluran preferensi politik bagi para simpatisan PPP di

Sleman, temuan peneliti mengenai fenomena kelompok simpatisan PPP Sleman juga menunjukkan bahwa, kelompok simpatisan PPP Sleman merupakan saluran kesejahteraan alternatif bagi para simpatisan, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan dalam diskursus pembangunan arus utama.

Saluran kesejahteraan alternatif tersebut didapatkan melalui relasi dengan patron politiknya. Hal ini disebabkan patron politik membutuhkan dukungan massa dalam mengarungi kontestasi politik. Sedangkan bagi kelompok simpatisan PPP Sleman, penting untuk memenangkan patron politik, karena apabila patron politik mereka memenangkan kontestasi dan memiliki kekuasaan, besar kemungkinan para simpatisan akan memiliki kemudahan dalam mengakses sumber-sumber perekonomian. Hal ini juga didorong oleh fakta bahwa sebagian besar anggota simpatisan merupakan masyarakat urban kalangan kelas menengah ke bawah, bahkan beberapa ada yang merupakan pengangguran. Sebagian dari mereka juga merupakan orang-orang jalanan yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi sebagai dampak diskursus pembangunan arus utama.

Sehingga, relasi dengan patron politik menuntun mereka pada saluran kesejahteraan alternatif, sebagai respon atas ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan. Bentuk kesejahteraan yang didapatkan bermacam-macam, mulai dari akses pengelolaan lahan parkir secara legal, pemanfaatan jasa pengamanan kelompok simpatisan PPP Sleman dalam setiap acara publik, hingga kemudahan dalam mencari pekerjaan tetap (walaupun sebagai pekerja kerah biru) baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta seperti *mall*, kafe, atau hotel. Di samping itu, bentuk kesejahteraan dari patron politik yang mereka dapatkan bisa berupa bantuan dana untuk pendirian unit usaha milik kelompok simpatisan, bantuan dalam mengakses program-program bantuan pemerintah, hingga bantuan dana untuk kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan kelompok simpatisan PPP Sleman.

Kesimpulan

Eksistensi kelompok simpatisan PPP Sleman merupakan wujud artikulasi preferensi politik masyarakat sipil khususnya mereka yang simpati terhadap pergerakan politik PPP dalam membangun diskursus perjuangan nilai-nilai Islam dalam ruang publik. Terbentuknya kelompok simpatisan PPP Sleman sendiri tidak terlepas dari adanya kesamaan preferensi politik yang kemudian mendorong para simpatisan PPP tersebut untuk membentuk sebuah wadah organisasi dan berasosiasi di dalamnya. Selain sebagai saluran preferensi politik, kelompok simpatisan PPP Sleman juga merupakan saluran kesejahteraan alternatif bagi para simpatisan. Melalui relasinya dengan patron politik, para simpatisan dapat mengakses berbagai bentuk saluran kesejahteraan sebagai respon atas ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan. Sebenarnya, masih ada banyak hal menarik mengenai fenomena kelompok simpatisan partai politik, khususnya yang ada di Sleman. Peneliti sendiri menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, terutama dalam hal keragaman dan kedalaman temuan. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk studi selanjutnya bisa ditekankan lagi dalam hal komparasi antar kelompok simpatisan partai politik yang berbeda, maupun dengan kelompok nonnegara yang berbeda seperti ormas keagamaan atau ormas yang berbasis jejaring sosio-kultural. Hal ini tentu saja untuk mengetahui seperti apa kecenderungan pola perilaku serta diskursus yang dikembangkan antar kelompok nonnegara tersebut dalam ruang publik.

Referensi

- Ahnaf, M. (2017). *Krisis Keistimewaan: Kekerasan Terhadap Minoritas di Yogyakarta*. CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.
- Ardha, B. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 105–120. <https://www.neliti.com/publications/142298/social-media-sebagai-media-kampanye-partai-politik-2014-di-indonesia>
- Blok, A. (1988). *The Mafia of Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violence Peasant Entrepreneurs*. Waveland Press.
- Budi, Y., & Hidayat, F. (2019). Peranan Laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Dalam Revolusi Indonesia 1945-1949. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/4265>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches/ John W. Creswell. 4th ed.* In Sage Publication.
- Facal, G. (2019). The Persistence of Civil Militias in Banten and Lampung, Indonesia. *Kawalu: Journal of Local Culture*, 6(1). <https://doi.org/10.32678/kawalu.v6i1.2045>
- Fakih, M. (2013). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. INSIST PRESS dan Pustaka Pelajar.
- Fealy, G., & McGreror, K. (2010). Nahdatul Ulama and the killings of 1965-1966: religion, politics, and remembrance. *Indonesia*, 89, 37–60. <http://www.jstor.org/stable/20798214>
- Fusch, P., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Social Change*, 10(1). <https://doi.org/10.5590/josc.2018.10.1.02>
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Galary, A., & Volkov, V. (2003). Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism. *Contemporary Sociology*, 32(5). <https://doi.org/10.2307/1556481>
- Gunawan, FX, R., & Patria, N. (2002). *Premanisme Politik*. ISAI.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of The Public Sphere. (T. Burger and F. Lawrence, Trans.)*. In Contemporary Sociology.
- Hadiz, V. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. LP3ES.
- Hadiz, V. (2010). *Localising Power In Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hamid, A., & Masaaki, O. (2008). Jawara in Power, 1999-2007. *Indonesia*, 86, 109–138. <http://www.jstor.org/stable/40376462>
- Kafid, N. (2016). Dari Islamisme ke “Premanisme”: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4737>
- Lubis, L. (2016). *Laskar JOXZIN Sebagai Instrumen Politik PPP dalam Penegakan Amar Makruf Nahi Mungkar di Yogyakarta [UIN Sunan Kalijaga]*. http://digilib.uin-suka.ac.id/20723/1/1420310082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Masaaki, O., & Rozaki, A. (2006). *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*. IRE Press.
- Mudhoffir, A. M. (2017). Islamic Militias and Capitalist Development in Post-Authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4).

- <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1336564>
- Mulyaningsih, J., & Hamidah, D. N. (2018). Laskar Santri Pejuang Negeri: Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3519>
- Nina, F. (2012). *Representasi Identitas Betawi Dalam Forum Betawi Rempug (FBR)* [Universitas Indonesia]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39155>
- Nordholt, H., & Erman, S. (2002). *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Pribadi, Y. (2015). The Klebun, The Kiai and The Blater: Notes from Western Madura, Indonesia. *South East Asia Research*, 23(3), 303–317. <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0267>
- Priyono, C. (2019). Laskar Laut Sibolga Pada Perang Kemerdekaan RI (1946-1949). *Jurnal ESTUPRO*, 4(2), 44–58. <https://www.jurnal.ugn.ac.id/index.php/ESTUPRO/article/view/374>
- Raditya, A. (2011). Politik Keamanan Jagoan Madura. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0006>
- Rodgers, D. (2006). The State as a Gang: Conceptualizing The Governmentality of Violence in Contemporary Nicaragua. In *Critique of Anthropology*. <https://doi.org/10.1177/0308275X06066577>
- Saepudin, D., & Kamaruddin, D. (2018). *Jawara and Local Election (Case Study of The Jawara Role of Tjmande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir to Win Wahidin Halim-Andika Hazrumy in The 2017 Banten gubernatorial Election)*. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.19>
- Salim, H. (2004). *Kelompok paramiliter NU*. LkiS.
- Sassen, S. (2003). Globalization or denationalization? In *Review of International Political Economy* (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/0969229032000048853>
- Satya, P. (2017). How Violence Erupted: Front Pembela Islam Activity In Yogyakarta. *International Conference of ASEAN Golden Anniversary*, 72–95. <https://www.neliti.com/publications/231171/how-violence-erupted-front-pembela-islam-activity-in-yogyakarta>
- Schulte-Bockholt, A. (2006). *The Politics of Organized Crime and The Organized Crime of Politics: A Study in Criminal Power*. Lexington Books.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stanley, W. (1996). *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*. Temple University Press.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumarto, M. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. UGM Press.
- Suyawan, I. N. (2014). Politik Kekerasan (Para Jagoan) dan Dendam di Bali. *Antropologi Indonesia*, 0(1). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i1.3577>
- Tajima, Y. (2018). Political Development and the Fragmentation of Protection Markets: Politically Affiliated Gangs in Indonesia. *Journal of Conflict Resolution*, 62(5). <https://doi.org/10.1177/0022002716669810>

- Tilly, C. (2012). The Politics of Collective Violence. In *The Politics of Collective Violence*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511819131>
- Wilson, I. (2014). Morality Racketeering: Vigilantism and Populist Islamic Militancy in Indonesia.
In *Between Dissent and Power*. https://doi.org/10.1057/9781137408808_12
- Wilson, I. (2018). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru (Suryana, Trans.)*. Marjin Kiri.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods (3rd Ed)*. In Sage Publication.

Wawancara

- AV.(2020). Sleman, 19 Juni, 2020.
- B. (2020). Sleman, 16 Juni, 2020.
- C. (2020). Sleman, 24 Juni, 2020.
- IS. (2020). Sleman, 26 Juni, 2020.
- RA. (2020). Sleman, 24 Januari, 2020.
- S. (2020). Sleman, 28 Agustus, 2020.
- UBR. (2020). Sleman, 11 September, 2020.
- WA. (2020). Sleman, 11 Januari, 2020.
- WB. (2020). Sleman, 18 Januari, 2020.